

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Membaca proses demokrasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah selalu menarik, karena sejarah berdemokrasi di kawasan Timur Tengah selalu menghadirkan beragam kejutan gejolak sosial yang sulit diprediksi. Apalagi memasuki abad ke-21, gejolak politik di kawasan Timur Tengah benar-benar melahirkan revolusi sosial politik yang dahsyat. Negara-negara dunia bahkan harus membuka mata lebar-lebar terkait revolusi sosial politik yang terus berkembang di Timur Tengah.

Salah satu negara yang mengalami gejolak revolusi adalah negara Mesir. Revolusi yang terjadi di Mesir menjadi sangat menarik, karena negeri ini menjadi pendulum lahirnya etos pembaharuan pemahaman ajaran Islam yang telah diajarkan Muhammad Abduh dan murid-muridnya. Tetapi pembaharuan pemahaman ajaran Islam yang digulirkan Abduh juga melahirkan gerakan sosial politik yang memilukan, yakni lahirnya Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi sosial yang berhaluan keras dalam memahami kebijakan politik Mesir dan dunia Islam secara umum.

Arus gerakan radikalisme yang dilakukan gerakan Ikhwanul Muslimin bahkan sampai menyebar hampir semua negara Islam. Gerakan protes sosial yang dilancarkan Ikhwanul Muslimin di berbagai negara Islam begitu berani

bertentangan dengan para penguasa totaliter. Bahkan tidak sedikit nyawa yang melayang dalam gerakan yang dilancarkan Ikhwanul Muslimin.

Tetapi, kala Mesir mengalami puncak revolusinya pada 25 Januari 2011, gerakan Ikhwanul Muslimin menjadi perhatian sendiri dalam perpolitikan Mesir dan dunia Islam secara umum. Terbukti, Ikhwanul Muslimin akhirnya mendirikan Partai bernama Partai Kebebasan dan Keadilan (*hizbul hurriyah wal adalah*), atau dikenal dengan FJP (*Freedom and Justice Party*). Kalau pada awalnya Ikhwanul Muslimin dicap sebagai gerakan ekstremis dan radikal, bahkan oleh Husni Mubarak diklaim sebagai organisasi terlarang, tetapi Ikhwanul Muslimin ketika gejolak revolusi Mesir justru menjadi pahlawan yang di banggakan rakyat Mesir. Terbukti, FJP menjadi pemenang dalam Pemilu Legislatif 2012 di Mesir.

Kajian mengenai FJP ini masih belum dilakukan oleh para peneliti, karena peristiwanya memang baru saja terjadi, yakni pada Januari 2012. Karena itu, penulis tertarik untuk memilih skripsi ini dengan judul “Kemenangan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) di Mesir dalam Pemilu Legislatif 2012”.

## **B. Latar Belakang**

Pasca jatuhnya Husni Mubarak dalam Revolusi di Mesir pada 25 Januari 2011, pergolakan politik di Mesir mengalami perubahan yang luar biasa. Tumbanganya Husni Mubarak menjadikan banyak kalangan mendirikan partai politik sebagai media aspirasi publik yang selama Husni Mubarak tidak terwujud

Salah satu gerakan politik yang selama ini dibungkam oleh Husni Mubarak adalah Ikhwanul Muslimin. Pasca tumbanganya Husni Mubarak, Ikhwanul Muslimin mendirikan Partai bernama Partai Kebebasan dan Keadilan (*hizbul hurriyah wal adalah*), atau dikenal dengan FJP.<sup>1</sup>

Apa yang terjadi di Mesir pasca revolusi dengan lahirnya berbagai partai politik ini merupakan fase, yang disebut O'Donnell dan Schmitter sebagai fase liberalisasi politik. Apa yang disebut liberalisasi adalah proses pendefinisian ulang dan perluasan hak-hak. Liberalisasi merupakan proses mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Liberalisasi politik awal pasca Orde Baru ditandai antara lain terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat.<sup>2</sup>

Ketika rezim Mubarak tumbang, setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun ditahan oleh negara. Konsekuensi dari liberalisasi politik ditandai dengan terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Pada tataran akar rumput (*grass root*), ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, amuk massa, atau praktek penjarahan kolektif. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elit politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik.<sup>3</sup>

Terbukanyademokrasi pasca rezim Mubarak berimbas pada meledaknya partisipasi politik. Ini bukanlah hal yang mengejutkan, karena sejarah peradaban dunia sudah mengabarkan bahwa rezim otoriter selalu ditumbangkan oleh anak

---

<sup>1</sup> Abu Ghazzah, *Musim Semi Revolusi Dunia Arab: Success Story Partai Kebebasan dan Keadilan, Sayap Politik Ikhwanul Muslimin Mesir* (Jakarta: Maktabah Ghaza, 2012), hlm. 21

<sup>2</sup> Vedi R Hadiz, *Localising Power In Post-Authoritarian Indonesia* (California: Stanford

negerinya sendiri.<sup>4</sup>Sebuah sistem politik yang sangat akut ini sedang mencari format terbaik, guna terciptanya sebuah sistem yang sehat untuk terciptanya proses demokratisasi.

Dari sini, lahirlah berbagai partai politik.Ikhwanul Muslimin menjemput peluang di tengah liberalisasi politik ini dengan membentuk partai baru bernama FJP.Sebagai organisasi yang telah berdiri sejak 1928, Ikhwanul Muslimin mempunyai jaringan sosial dan jaringan politik yang kuat di Mesir, bahkan jaringan politik Ikhwanul Muslimin sudah menyebar hampir semua negara di Timur Tengah dan belahan negara di dunia Islam.Kuatnya jaringan politik Ikhwanul Muslimin ini menjadikan semangat tersendiri untuk bersatu dalam membangun demokrasi di Mesir pasca Husni Mubarak.<sup>5</sup>

Para petinggi Ikhwanul Muslimin menilai bahwa jaringan internasional yang dimiliki Ikhwanul Muslimin memberikan semangat yang sangat besar untuk membangun dukungan politik lahirnya partai baru.Dukungan internasional ini dijadikan modal oleh Ikhwanul Muslimin untuk mengobarkan semangat perjuangan para kader Ikhwanul Muslimin dalam menata kembali Mesir.Bukan saja di Timur Tengah, dukungan politik kader Ikhwanul Muslimin juga menyebar dari negara-negara Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika.<sup>6</sup>

Jaringan internasional yang dimiliki Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu pilar gerakan politik dakwah yang selama ini diandalkan dalam berbagai gerakan sosial Ikhwanul Muslimin.Dengan jaringan internasional itulah, Ikhwanul

---

<sup>4</sup>Anas Urbaniyungum *Melamar Demokrasi: Dinamika Politik Indonesia* (Jakarta: Republik, 2004)

Muslimin mampu membangun peta gerakan politik dakwah, mampu membuka aliansi internasional dan mampu melakukan negoisasi dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di berbagai belahan dunia. Tak bisa dipungkiri, jaringan internasional yang dimiliki Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu kekuatan politik yang digunakan Ikhwanul Muslimin untuk menggerakkan perubahan sosial di Mesir. Dari sinilah, lahirnya partai bernama FJP berkait erat dengan jaringan internasional yang dimiliki Ikhwanul Muslimin.<sup>7</sup>

Selain FJP, ada juga Partai Nur, Partai Wafd, dan Partai Remaja Revolusioner. Ini ditambah partai lama sebelumnya, yakni Partai Nasional Demokrat dan Partai Aliansi Mesir. Masih banyak partai-partai kecil, tetapi tidak mendapatkan suara. Di samping juga banyak partai yang sebelumnya tidak lolos dalam verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mesir.<sup>8</sup>

Yang menarik dari FJP adalah partai politik yang baru lahir pada 22 Februari 2011. Sementara Pemilu Legislatif dimulai pada Desember 2011 sampai Januari 2012. Waktu yang digunakan untuk mempersiapkan diri dan konsolidasi hanya sekitar 11 bulan. Ini jelas waktu yang sangat pendek. Sementara partai lain yang sudah bertaha dan mempunyai infrastruktur sejak masa rezim Mubarak, sudah mempunyai kelengkapan strategi yang cukup.

Waktu yang sangat singkat untuk ukuran partai politik yang bertarung dalam Pemilu di Mesir jelas tidak cukup. Karena infrastruktur modern untuk partai politik biayanya juga mahal, apalagi ditambah waktu yang sangat singkat. Hal yang sama juga dialami Partai Nur, Partai Wafd, dan Partai Remaja

---

<sup>7</sup>Zuhairi Misrawi, Ikhwanul Muslimin di Mesir, *Kompas*, 30 Januari 2012.

<sup>8</sup>Abu Ghazzah, *Musim Semi...* hlm. 9

Revolusioner. Mereka baru lahir pasca tumbanganya Mubarak. Apalagi ditambah polling yang dilakukan Tim Litbang Ikhwanul Muslimin pada Juli 2011 bahwa peluang FJP dalam Pemilu Legislatif hanya memenangkan suara berkisar 15-25 %.<sup>9</sup>

Dalam konteks inilah, menarik kalau dilihat lebih jauh hasil suara FJP ketika meraih suara terbesar dalam Pemilu Legislatif yang berlangsung tiga putaran, mulai November 2011 sampai Januari 2012. FJP memenangkan kursi parlemen, karena mendapatkan suara 47 persen. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) memenangkan 235 kursi di Majelis Rakyat baru, atau 47,18 persen. Berdasarkan hasil akhir itu, FJP menjadi fraksi terkuat, dengan meraih 235 dari 498 kursi di parlemen. Sementara Partai Nur atau juga disebut kelompok Salafi yang berhaluan konservatif garis keras, hanya meraih 121 kursi.<sup>10</sup>

FJP ini juga melampaui perolehan suara partai-partai sekuler, karena partai-partai sekuler dan liberal hanya dapat mencapai perolehan suara yang kurang memuaskan. Partai liberal Wafd hanya memperoleh sekitar 8 persen suara atau 42 kursi. Partai Aliansi Mesir yang berhaluan sekuler hanya meraih sekitar 7 persen suara atau 33 kursi. Media massa Mesir melaporkan, seluruhnya 15 partai terwakili di parlemen. Partai remaja revolusioner yang berperan besar menumbangkan rezim Mubarak, samasekali tidak terwakili di parlemen. Juga partai perempuan dan partai Kristen.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Lihat dalam FJP dan Challenge in Mesir dalam [www.ikhwanonline.com](http://www.ikhwanonline.com). Akses 1 Juni 2012.

<sup>10</sup>Abu Ghazzah, *Musim Semi...* hlm. 23

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 25

### **C. Rumusan Masalah**

*Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) di Mesir dalam Pemilu Legislatif 2012?*

### **D. Kerangka Teori**

Dalam mengkaji rumusan masalah tersebut, penulis akan menggunakan teori tentang partai politik.

#### **1. Partai Politik**

Memahami partai politik tak bisa dilepaskan dari infrastruktur politik. Menurut Sarjono Sastroatmodjo, infrastruktur politik terdiri dari beberapa komponen, yakni partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik dan tokoh politik.<sup>12</sup> Jadi, partai politik merupakan salah satu bagian infrastruktur politik dan sistem politik dalam suatu negara. Peran partai politik sangat besar bagi proses demokratisasi suatu negara, karena partai politik merupakan organisasi resmi yang bisa mengikuti pemilihan umum.

Sementara definisi partai politik, banyak ahli yang memberikan penjelasan. Salah satunya adalah Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan bersifat adil serta materiil (*A political, party is a group of human being, stably organized with the objective of securing or*

<sup>12</sup>Sarjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995) hlm. 116

*maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages).*<sup>13</sup>

Ilmuan lain bernama Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *modern political parties*, mengemukakan pengertian partai politik sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of government political power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*).<sup>14</sup>

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Sementara itu, seorang ilmuan bernama Giovanni Sartori mengungkapkan tentang definisi partai politik:

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Miriam Budiardio, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, cet. Ke-30, 2007) hlm. 404

Secara umum, menurut Miriam Budiardjo, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>16</sup>

## **2. Variabel yang Berpengaruh dalam Memilih Partai Politik**

Setelah memahami definisi-definisi tersebut, ada beberapa variabel yang berpengaruh dalam memilih partai politik. Menurut Angus Campbell ada tiga variabel utama yang berpengaruh terhadap perilaku individu dalam memilih suatu partai politik. Ketiga variabel tersebut adalah:

*Pertama*, identifikasi terhadap partai.

Menurut Campbell, secara psikologis individu memilih suatu partai politik karena adanya kesetiaan dan cintanya terhadap partai politik tersebut. Sebagian masyarakat sering masih memiliki kesetiaan tradisional kepada suatu partai karena citra partai tersebut atau karena retorika para pemimpinnya. Kesetiaan terhadap suatu partai sering digoyahkan oleh kekecewaan dan ketidakpuasan para pendukungnya sehingga mereka memindahkan pilihan dukungan. Pilihan-pilihan lebih dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan praktis dan pragmatis berupa kepentingan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kondisi-kondisi sosial seperti pendidikan, standar kehidupan ekonomi, status sosial yang pada akhirnya mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran politik

Menurut Campbell, dengan pertimbangan ini individu memilih partai yang mereka anggap layak dan sanggup untuk memimpin pemerintahan. Kelayakan itu ditentukan oleh isu yang sedang berkembang. Perkembangan ini selanjutnya menuntut partai untuk dapat tanggap dan mengetahui siapa dan bagaimana massa yang diharapkan jadi pendukungnya. Partai kemudian jadi lebih reformis dan representatif melalui kompromi sedikit demi sedikit terhadap ideologinya masing-masing sehingga partai kehilangan ciri khas ideologinya yang kemudian digantikan dengan lintas kelas-rasional-agama-etnis dan kepentingan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, orientasi terhadap calon (kandidat).

Menurut Campbell, individu memilih partai politik tertentu karena kualitas personel kandidat, perilaku ini terbagi dalam dua bagian yaitu: a) Kualitas instrumental, dimana pemilih melihat kemampuan kandidat dalam menangani suatu masalah tertentu; b) Kualitas simbolis, dimana pemilih mempunyai pandangan bagaimana seharusnya pemimpin yang baik seperti misalnya yang jujur, baik hati, sederhana dan sebagainya.

Dalam sistem politik lebih dari satu partai agar dapat menguasai pemerintahan maka partai-politik harus dapat memperoleh mayoritas kursi di parlemen. Partai-partai politik mempunyai daya tarik politik yang tidak sama dalam berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan pengalaman sosialnya yang khas dan latar belakang sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu, agar dapat menang dalam pemilihan umum, partai harus memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam hal

---

<sup>17</sup>Robert Michels, *Political Parties* (New York: The Free Press of Glancoe, 1958) hlm. 304-305; dan Maurice Duverger, *Political Parties* (London : Mutheun, 1954), hlm. 17

kepanduan dan konsentrasi dari organisasinya. Kepanduan menentukan daya saing, yaitu menggunakan sumber daya dan memanfaatkan arena pertarungan seperti parlemen nasional, pemilihan umum, media massa dan massa pemilih serta kemampuan merumuskan tujuan-tujuan dan menentukan strategi-strategi.<sup>18</sup>

Sementara itu mengapa masyarakat memilih suatu partai politik, menurut Mark N. Hagopian adalah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Motif ideologi partai tersebut.

Ideologi sebagai landasan perjuangan partai yang menentukan kualitas, arah gerak dan tujuan partai, memiliki peranan yang besar untuk menarik dan menghimpun dukungan rakyat. Terlepas apakah itu *self justification* dari elit partai ataukah *mass deception* oleh pimpinan partai, citra partai yang diidealisir tersebut mampu dijadikan sebagai alat penarik pendukung untuk melawan dan mengalahkan saingan politiknya.

2. Keuntungan yang mungkin diraih oleh suatu kelompok atas pilihannya.

3. Isu-isu yang berkembang pada saat itu.

4. Tradisi individu dalam melakukan pemilihan.<sup>19</sup>

Dalam teori-teori ini, FJP mendapatkan pengakuan pemilih karena program kerjanya yang sesuai dengan semangat revolusi, para tokoh FJP adalah tokoh dalam IM yang berpengaruh di masyarakat, dan isu-isu yang dikembangkan sesuai dengan semangat rakyat dalam membangun Mesir pasca Mubarak.

---

<sup>18</sup>Robert Dahl, dalam Miriam Budiarjo, ed, *Partipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 108.

<sup>19</sup>Maurice Duverger, *Political...* hlm. 266

Dalam konteks di atas, FJP ditempatkan sebagai partai politik yang mempunyai asal-asal tertentu, ciri tertentu dan melakukan fungsi politiknya di Mesir. FJP mempunyai tahap sejarah yang akan dianalisis melalui teori tersebut, sehingga bisa menempatkan FJP dalam ruang teori partai politik. Kalau FJP sudah ditempatkan sebagai realitas politik tersebut, maka teori-teori ini akan digunakan untuk menganalisis gerak FJP sebagai salah satu partai politik yang baru lahir di Mesir pasca tumbanganya rezim Hosni Mubarak.

#### **E. Hipotesis**

Ada dua hipotesis yang penulis kemukakan:

1. Kemenangan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) dalam Pemilu Mesir pasca Mubarak karena program kerjanya sesuai dengan semangat revolusi.
2. tokoh-tokohnya FJP berpengaruh di masyarakat.
3. Kuatnya ikatan ideologis antara masyarakat dengan FJP.

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan FJP dalam Pemilu legislatif 2012.
2. Mengetahui gerak politik FJP dalam membangun demokrasi di Mesir pasca jatuhnya Hosni Mubarak

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif*(deskriptif). Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa padaa masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

### **2. Jenis Data**

Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data melalui *library research* (studi kepustakaan).

### **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan studi pustaka. Diambil dari buku, majalah, koran,website, dan lain-lain.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan bab yang berisi lima bab. Setiap bab menjabarkan pembahasan dan kajian khusus yang terkait dengan penelitian yang dimaksud. Berikut ini sistematika penulissannya

Bab I berisi tentang gambaran awal proposal penelitian, yakni alasan pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang transisi politik di Mesir pasca jatuhnya Hosni Mubarak. Disini akan dijelaskan kontestasi sosial politik antar kelompok pasca jatuhnya Mubarak dan gerak demokrasi yang sedang jatuh, sehingga lahir berbagai kekuatan politik yang sebelumnya terlarang. Dari sini akan kelihatan bagaimana lahirnya partai-partai revolusi, termasuk FJP.

Bab III berisi sejarah Pemilu Mesir pasca jatuhnya Hosni Mubarak. Di sini akan dijelaskan bagaimana Pemilu itu dijalankan, siapa aktornya, dan apa hasil Pemilu itu sendiri.

Bab IV berisi jawaban atas hipotesis dalam penelitian ini, yakni tentang faktor-faktor kemenangan FJP dalam Pemilu legislatif 2012. Faktor-faktor pendorong yang dimaksud akan dikaji dalam konteks realitas FJP sebagai partai politik yang baru lahir. Factor-faktor kemenangan itu juga akan dibahas dalam skema sistem politik yang berkembang di Mesir.

Bab V berisi kesimpulan yang merunakan iawaban dari nersoalan yang ada